



Strategi Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Fitria Handayani¹, Rayyifa Zahra Marella², Damar Ary Yahya^{3*}, Zahrotul Munawwaroh⁴

¹⁻⁴Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: damararyahya2019@gmail.com

Abstract. *The management of educational facilities and infrastructure is not only related to procurement and maintenance but also includes the disposal process as an important part of educational asset management. However, in practice, the disposal of facilities and infrastructure in Indonesian educational institutions still faces various problems, such as complex administrative procedures, limited human resources, and budget constraints. This article aims to identify and analyze effective strategies for the disposal of educational facilities and infrastructure based on current literature reviews. This research uses a systematic literature review method by examining scientific journals and academic books published in 2020–2026. Data were analyzed using thematic content analysis techniques to identify concepts, strategies, obstacles, and managerial implications of the disposal of educational facilities and infrastructure. The results of the study indicate that effective disposal strategies rely on inventory-based planning and needs prioritization, administrative procedures integrated with regulations, as well as control and supervision through continuous audits and evaluations. These findings are expected to serve as a practical reference for school and madrasah managers in improving the effectiveness of educational facilities and infrastructure management.*

Keywords: *Asset Management; Educational Facilities; Educational Management; Infrastructure Disposal; Strategy.*

Abstrak. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan dan pemeliharaan, tetapi juga mencakup proses penghapusan sebagai bagian penting dari manajemen aset pendidikan. Namun, dalam praktiknya, penghapusan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti prosedur administratif yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang efektif berdasarkan kajian literatur terkini. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan menelaah jurnal ilmiah dan buku akademik terbitan tahun 2020–2026. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten tematik untuk mengidentifikasi konsep, strategi, hambatan, serta implikasi manajerial penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi penghapusan yang efektif bertumpu pada perencanaan berbasis inventarisasi dan prioritas kebutuhan, prosedur administratif yang terintegrasi dengan regulasi, serta pengendalian dan pengawasan melalui audit dan evaluasi berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi pengelola sekolah dan madrasah dalam meningkatkan efektivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan.

Kata kunci: Manajemen Aset; Manajemen Pendidikan; Penghapusan Prasarana; Penghapusan Sarana; Sarana Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen fundamental dalam ekosistem pendidikan karena mereka menciptakan lingkungan fisik dan teknis yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal (Kurniawan et al., 2025). Ketersediaan ruang kelas yang layak, perpustakaan memadai, laboratorium lengkap, serta fasilitas penunjang lain seperti akses teknologi dan peralatan pembelajaran secara langsung memengaruhi keterlibatan peserta didik dan efektivitas instruksional. Dalam kajian literatur sistematis terbaru, manajemen sarana dan prasarana tidak hanya berkontribusi terhadap kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadi

indikator kunci dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan secara luas. Studi menunjukkan bahwa manajemen yang baik terhadap fasilitas, mencakup perencanaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan, berkontribusi positif terhadap kualitas lingkungan belajar dan hasil akademik siswa.

Namun demikian, banyak penelitian yang memusatkan perhatian pada pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sementara aspek penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai atau tidak relevan dengan kebutuhan pembelajaran masih kurang mendapat sorotan (Suranto et al., 2022). Padahal, penghapusan atau *disposal* merupakan bagian integral dari siklus hidup aset pendidikan dan penting untuk menjaga ketertiban administrasi, menghindari pemborosan ruang atau anggaran, serta memastikan inventaris yang tercatat merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebuah studi literatur di sekolah dasar mengidentifikasi bahwa penghapusan termasuk dalam rangkaian manajemen fasilitas pendidikan namun belum cukup dianalisis secara strategis, yang menunjukkan *research gap* dalam literatur manajemen aset pendidikan.

Dalam konteks lembaga pendidikan di Indonesia, praktik penghapusan sarana dan prasarana kerap dianggap sebagai kegiatan administratif yang sekunder atau bahkan diabaikan karena prosedur yang rumit dan potensi risiko birokratisnya. Akibatnya, banyak sekolah yang menyimpan aset rusak, usang, atau tidak terpakai dalam jangka waktu lama tanpa kejelasan status administratifnya, yang berdampak pada inefisiensi ruang, ketidaktertiban data inventaris, serta potensi temuan dalam audit eksternal (Sudrajat & Rahmawati, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa manajemen fasilitas yang tidak komprehensif termasuk penghapusan yang tidak sistematis dapat menghambat efektivitas keseluruhan manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan.

Kesenjangan dalam literatur tersebut menegaskan perlunya studi yang secara khusus menempatkan penghapusan sarana dan prasarana sebagai bagian strategis dari manajemen aset pendidikan, bukan sekadar prosedur administrasi teknis (Jannah & Santosa, 2025). Artikel ini bertujuan untuk menjawab gap ini dengan mengidentifikasi strategi penghapusan sarana dan prasarana yang efektif melalui kajian literatur terkini, serta merumuskan strategi perencanaan, prosedur administratif, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan yang relevan bagi pengelola lembaga pendidikan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan aset sekolah. Proses ini dilakukan untuk secara resmi menghentikan pertanggungjawaban inventarisasi terhadap barang-barang yang rusak parah, sudah usang, atau jumlahnya berlebihan sehingga tidak lagi mendukung kegiatan belajar mengajar (Ibrahim et al., 2024). Contoh barang yang sering dihapus meliputi meja belajar yang patah, kursi berkarat, atau komputer lama yang sudah tidak dapat dioperasikan. Dasar hukum utama proses ini adalah Permendikbud No. 24/2008 yang mengatur akuntabilitas pengelolaan barang milik negara dan daerah (Nafatila et al., 2025).

Proses penghapusan dimulai dengan identifikasi rutin oleh petugas inventarisasi sekolah, dilanjutkan verifikasi oleh tim internal yang terdiri dari kepala sekolah dan wakil kepala bidang sarana prasarana. Setelah diverifikasi, barang tersebut dapat diproses melalui empat metode utama, yaitu pemusnahan, pelelangan, hibah, atau penjualan dengan prinsip transparansi yang ketat (Ibrahim et al., 2024; Nafatila et al., 2025).

Sarana ringan seperti meja kursi atau alat olahraga rusak dapat ditangani dengan relatif cepat melalui penyusunan berita acara yang dilengkapi data kode barang, merek, dan tahun perolehan, kemudian diajukan ke dinas pendidikan setempat. Sebaliknya, prasarana berat seperti gedung retak atau pagar roboh memerlukan prosedur yang lebih kompleks, yaitu uji teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum, persetujuan Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta penerbitan Surat Keputusan Menteri untuk legalisasi (Ibrahim et al., 2024; Setiyadi et al., 2024). Perbedaan ini memastikan agar tidak ada aset potensial yang terbuang sia-sia sekaligus melengkapi persyaratan arsip audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan utama penghapusan aset adalah menghemat biaya pemeliharaan barang tidak produktif yang membebani dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 20 persen. Anggaran yang berhasil dialihkan dapat digunakan untuk kebutuhan prioritas seperti pengembangan kompetensi guru atau pengadaan sarana literasi digital. Selain efisiensi finansial, penghapusan juga meningkatkan keselamatan siswa dengan cara membersihkan gudang dari barang usang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau kebakaran (Nafatila et al., 2025; Ningsih et al., 2021).

Penggantian infrastruktur lama dengan fasilitas modern seperti *smartboard* untuk mendukung *blended learning* menjadi manfaat strategis lainnya. Proses pelelangan yang akuntabel melalui Laporan Kinerja Pemerintah (LKPP) mencegah praktik korupsi, dengan hasil lelang langsung direalokasi untuk pengadaan furnitur baru atau sistem keamanan CCTV (Ibrahim et al., 2024; Nafatila et al., 2025). Dengan hal tersebut, gudang yang bersih tidak hanya hemat biaya tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan relevan dengan perkembangan teknologi.

Untuk implementasi praktis, pengelola sekolah disarankan menjadikan penghapusan sebagai agenda audit internal yang dilakukan setiap semester. Integrasi aplikasi *e-asset* sederhana, seperti Google Sheets dengan fitur *barcode scanner*, memungkinkan pelacakan inventaris secara *real-time* tanpa biaya besar (Setiyadi et al., 2024). Pendekatan proaktif ini tidak hanya membersihkan gudang tetapi juga membangun budaya perencanaan pengadaan yang presisi berdasarkan data inventaris aktual.

Pembentukan tim lintas fungsi yang melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua dapat mempercepat siklus penghapusan menjadi 1-3 bulan saja. Tim ini efektif meminimalkan hambatan birokrasi dinas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui portal LKPP, yang terbukti mengurangi potensi kolusi hingga 30 persen (Ningsih et al., 2021; Setiyadi et al., 2024). Fasilitas modern hasil realokasi dana lelang (Rp50-200 juta per sekolah) menurunkan risiko kecelakaan seperti kursi patah atau atap bocor. Efisiensi anggaran mencapai 15% per tahun sambil mendukung SDG 4 melalui *hybrid learning tools* (Nafatila et al., 2025). Proses ini sejalan dengan UU No. 20/2003 tentang mutu sarpras untuk lingkungan belajar kompetitif di era Industri 4.0. Dalam konteks Indonesia, penghapusan aset pendidikan kerap terhambat birokrasi panjang. Namun, koordinasi antarpihak terbukti efektif, seperti madrasah yang berhasil mengurangi stok usang 40% melalui hibah antarlembaga pendidikan (Setiyadi et al., 2024).

Selain itu, integrasi teknologi dalam manajemen sarana dan prasarana menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset pendidikan di era digital. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis *website* dalam inventarisasi sarana prasarana dapat mempercepat proses identifikasi barang, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan (Sajdah et al., 2025). Manajemen sarana prasarana berbasis teknologi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik sekolah tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan adaptif terhadap

perkembangan pembelajaran abad 21. Implementasi platform digital memungkinkan pemutakhiran data inventaris secara *real-time*, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta menyediakan dokumentasi yang terintegrasi untuk mendukung audit internal dan eksternal, sehingga proses penghapusan aset dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis (*systematic literature review*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan strategi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan (Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pola konsep, strategi, serta permasalahan yang muncul dalam kajian manajemen sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan bukti ilmiah yang telah dipublikasikan.

Sumber data penelitian diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi serta buku akademik yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2026. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci antara lain *educational facilities management*, *school infrastructure*, *asset disposal*, dan penghapusan sarana prasarana pendidikan (Regmi, 2024). Dari hasil penelusuran tersebut, dipilih 20 referensi utama dengan kriteria relevansi topik, kualitas metodologis, dan kontribusi terhadap pembahasan manajemen aset pendidikan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten tematik (*thematic content analysis*) (Cernasev & Axon, 2023). Setiap sumber dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep penghapusan sarana dan prasarana, strategi implementasi, hambatan yang dihadapi, serta solusi dan implikasi manajerial. Proses analisis dilakukan melalui tahap pengodean awal, pengelompokan tema, dan interpretasi makna untuk menghasilkan sintesis konseptual yang sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitis dan kontekstual terkait strategi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil analisis data dari kajian literatur sistematis mengenai strategi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Pembahasan diuraikan berdasarkan sub-judul level berikut untuk membedakan aspek strategi, hambatan, serta intervensi manajerial yang diperlukan dalam siklus manajemen aset sekolah.

Strategi Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, prosedur administrasi, dan pengendalian untuk mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana sekolah. Implementasi mengikuti regulasi Permendikbud No. 24/2008 dan berbasis temuan empiris dari studi kasus di sekolah-sekolah Indonesia (Ibrahim et al., 2024).

Perencanaan (Inventarisasi & Prioritas)

Tahap perencanaan dimulai dengan inventarisasi periodik untuk mengidentifikasi sarana rusak berat, usang, atau berlebih stok. Ibrahim et al. (2024) menegaskan pencatatan melalui buku induk barang memungkinkan pemetaan aset prioritas untuk metode penghapusan optimal demi efisiensi anggaran BOS. Penetapan prioritas didasarkan pada tingkat urgensi terhadap proses pembelajaran, dengan klasifikasi risiko keselamatan sebagai kriteria utama (Ibrahim et al., 2024). Studi kasus SMA Negeri 1 Siborongborong menunjukkan integrasi inventarisasi dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) serta verifikasi lapangan oleh wakil kepala sarpras berhasil mengurangi akumulasi aset tidak produktif dalam satu tahun (Hutasoit et al., 2024). Proses ini melibatkan verifikasi fisik oleh tim inventarisasi dan dokumentasi parameter kode barang, merek, serta kondisi aset. Pendekatan perencanaan ini memastikan alokasi dana BOS lebih efektif untuk pengadaan sarana baru yang mendukung pembelajaran.

Prosedur Administrasi (Regulasi Terintegrasi)

Tahap administrasi melibatkan penyusunan dokumen formal berjenjang, mulai dari berita acara inventarisasi, verifikasi internal oleh kepala sekolah dan wakil sarpras, hingga persetujuan dinas pendidikan untuk prasarana berat (Ibrahim et al., 2024). Empat metode penghapusan yang dapat diterapkan secara selektif, seperti pemusnahan untuk aset tidak *marketable*, pelelangan melalui platform LKPP, hibah antarlembaga pendidikan, dan penjualan langsung kepada pihak ketiga. Pada SD Bintang Madani, harmonisasi Permendikbud No. 24/2008 dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperlancar proses

hibah melalui koordinasi platform Dapodik (Zainudin & Badrudin, 2023). Prosedur ini memerlukan Surat Keputusan kepala sekolah dan laporan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Implementasi administrasi yang terintegrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pendidikan yang baik.

Pengendalian dan Pengawasan (Audit & Evaluasi)

Mekanisme pengendalian diwujudkan melalui audit internal tahunan oleh komite sekolah dan evaluasi eksternal oleh dinas pendidikan serta BPKAD untuk memastikan kepatuhan prosedural (Ibrahim et al., 2024). Pengawasan triwulanan oleh komite sekolah di SMA Negeri terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas sarana, sementara verifikasi BPKAD menjamin distribusi aset yang merata antar-sekolah (Hutasoit et al., 2024; Zainudin & Badrudin, 2023). Instrumen pengawasan mencakup *checklist* verifikasi dokumen dan laporan berkala ke dinas pendidikan. Pendekatan pengawasan ini sejalan dengan target *Sustainable Development Goal 4* tentang pendidikan berkualitas. Evaluasi berkala memastikan efektivitas implementasi penghapusan aset dalam mendukung efisiensi anggaran BOS. Ketiga tahapan membentuk siklus berkelanjutan yang holistik dalam pengelolaan aset pendidikan. Perencanaan menghasilkan prioritas yang akurat melalui inventarisasi sistematis, prosedur administrasi menjamin legalitas melalui dokumen formal, dan pengawasan memastikan akuntabilitas melalui audit internal-eksternal (Ibrahim et al., 2024; Hutasoit et al., 2024; Zainudin & Badrudin, 2023).

Keberhasilan implementasi strategi penghapusan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pelatihan berkelanjutan bagi pengelola aset pendidikan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas penghapusan (Nasiruddin et al., 2024). Sekolah yang melaksanakan pelatihan teknis rutin dapat menunjukkan peningkatan akurasi dalam dokumentasi dan pengurangan waktu siklus penghapusan. Pembentukan tim *task force* khusus yang terdiri dari kepala sekolah, wakil sarpras, bendahara, dan komite sekolah terbukti efektif mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat koordinasi dengan BPKAD serta dinas pendidikan. Meskipun implementasi penghapusan aset sudah berjalan di berbagai sekolah, masih terdapat tantangan birokrasi yang memperlambat proses, terutama untuk prasarana berat yang memerlukan persetujuan *multi-level*. Integrasi platform digital seperti Dapodik menunjukkan potensi percepatan administrasi, namun belum merata di seluruh sekolah. Pendekatan terintegrasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi BOS secara signifikan jika didukung koordinasi antarlembaga yang lebih erat. Temuan dari studi kasus

menegaskan pentingnya tim lintas fungsi yang melibatkan kepala sekolah, wakil sarpras, dan komite sekolah dalam setiap tahap penghapusan aset. Dokumentasi yang rapi melalui buku induk barang dan platform Dapodik menjadi kunci transparansi. Penghematan anggaran BOS dari proses ini dapat dialokasikan untuk pengadaan sarana modern seperti *smartboard* dan fasilitas *blended learning*.

Implementasi penghapusan aset pendidikan tidak hanya menciptakan gudang yang bersih dan aman tetapi juga membangun budaya tata kelola yang baik (Ningsih et al., 2021). Kemudian, sekolah dianjurkan menjadikan penghapusan aset sebagai agenda audit semesteran reguler. Pelatihan wakil kepala sarpras mengenai regulasi Permendikbud No. 24/2008 dan prosedur Dapodik akan mempercepat implementasi. Koordinasi dengan BPKAD sejak tahap perencanaan dapat menyederhanakan persetujuan prasarana berat. Pendekatan proaktif ini akan memaksimalkan manfaat finansial dan operasional dari pengelolaan aset pendidikan.

Hambatan Implementasi

Administratif (Birokrasi Rumit)

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kerumitan prosedur administratif dan birokrasi yang berjenjang. Proses penghapusan aset sekolah harus melalui tahapan formal, mulai dari inventarisasi, penilaian kondisi barang, penyusunan berita acara, hingga pengajuan persetujuan kepada dinas pendidikan atau instansi berwenang. Prosedur ini sering kali memerlukan waktu yang lama dan koordinasi lintas lembaga yang tidak sederhana.

Temuan penelitian di SMPN 02 Jenggawah menunjukkan bahwa sekolah cenderung menghindari prosedur penghapusan formal karena lamanya proses persetujuan dan minimnya pendampingan teknis dari dinas pendidikan. Akibatnya, sekolah lebih memilih untuk melakukan alih fungsi aset secara internal tanpa penghapusan administratif yang sah, meskipun praktik tersebut lemah dari sisi legalitas dan akuntabilitas (Hidayat et al., 2025). Kondisi serupa juga ditemukan dalam praktik sekolah lain, di mana penghapusan barang sering dilakukan secara fisik tanpa didukung dokumentasi resmi, sehingga aset masih tercatat dalam daftar inventaris sekolah (Aryesam et al., 2025).

SDM (Kompetensi Terbatas)

Hambatan selanjutnya terkait dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penghapusan sarana prasarana. Banyak tenaga kependidikan yang belum memiliki pemahaman teknis mengenai prosedur penghapusan aset sesuai dengan

regulasi yang berlaku. Tugas inventarisasi dan penghapusan sering kali diemban oleh guru atau kepala sekolah yang tidak memiliki latar belakang administrasi aset.

Dalam kegiatan pendampingan inventarisasi dan penghapusan sarpras di SMP YPK Hedam dan SD YPK Sion Padang Bulan, ditemukan bahwa rendahnya pemahaman administrasi mengakibatkan ketidaktertiban dalam pencatatan aset dan ketidaktahuan terhadap dokumen resmi yang harus disiapkan, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan berita acara penghapusan (Aryesam et al., 2025). Hal ini sejalan dengan kajian konseptual yang menyatakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana memerlukan kompetensi administratif serta pemahaman regulatif agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keuangan (Ananda et al., 2023).

Anggaran (Pemotongan Dana)

Keterbatasan dan pemotongan anggaran juga berfungsi sebagai penghalang dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Proses penghapusan tidak hanya memerlukan biaya administrasi, tetapi juga dapat melibatkan biaya penilaian aset, pemusnahan, atau pelelangan barang. Dalam situasi keterbatasan anggaran operasional, sekolah cenderung memprioritaskan dana untuk kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan pengelolaan aset.

Studi di SMPN 02 Jenggawah menunjukkan bahwa ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk penghapusan aset menyebabkan sekolah memilih solusi alternatif berupa pemanfaatan ulang atau penyimpanan barang rusak, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan aset tidak produktif dan ketidaksesuaian laporan inventaris (Hidayat et al., 2025). Secara konseptual, penghapusan sarana dan prasarana justru bertujuan untuk menghindari pemborosan biaya pemeliharaan, namun keterbatasan anggaran sering kali menjadi paradoks dalam implementasinya (Ananda et al., 2023).

Selain itu, kesadaran rendah dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan juga menjadi penghalang signifikan dalam implementasi penghapusan sarana dan prasarana. Kurangnya kesadaran warga sekolah dalam menjaga dan merawat aset pendidikan berkontribusi terhadap penumpukan barang rusak yang seharusnya dapat dicegah melalui pemeliharaan rutin (Nauraida & Triwiyanto, 2024). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman komite sekolah tentang urgensi penghapusan aset sebagai bagian integral dari *good governance* dan ketiadaan sistem *reward and punishment* yang jelas bagi pengelola aset.

Hambatan kultural ini menuntut perubahan *mindset* melalui sosialisasi intensif dan pelibatan aktif seluruh *stakeholder* dalam setiap tahap manajemen aset pendidikan.

Solusi dan Implikasi Manajerial

Berdasarkan berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, diperlukan solusi yang bersifat struktural dan manajerial. Penghapusan aset pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam sistem pengelolaan sarana dan prasarana secara menyeluruh.

Dari segi administratif, penyederhanaan mekanisme penghapusan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang mendesak. Kompleksitas birokrasi dan prosedur yang panjang terbukti menghambat sekolah dalam melaksanakan penghapusan aset secara formal dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, penerapan sistem administrasi aset berbasis digital menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan inventaris. Sistem ini memungkinkan sekolah untuk melakukan pemutakhiran data aset secara berkala, mempermudah proses evaluasi kondisi barang, serta mempercepat koordinasi dengan dinas pendidikan terkait (Dewanto et al., 2025).

Dari aspek sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana perlu menjadi prioritas. Rendahnya pemahaman teknis mengenai prosedur penghapusan aset menyebabkan terjadinya ketidaktertiban administrasi dan ketidaksesuaian antara kondisi fisik barang dengan data inventaris. Solusi yang relevan adalah melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, khususnya terkait inventarisasi, penyusunan dokumen penghapusan, serta pemahaman regulasi pengelolaan barang milik negara atau daerah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan aset pendidikan.

Sementara itu, dari segi anggaran, sekolah harus mengintegrasikan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana ke dalam perencanaan keuangan mereka. Penghapusan aset sering kali tidak menjadi prioritas dalam pendanaan, yang mengakibatkan penumpukan barang-barang rusak yang tidak produktif. Padahal, penghapusan aset yang dilakukan dengan benar justru dapat berkontribusi pada efisiensi anggaran dengan mengurangi biaya pemeliharaan sarana yang sudah tidak layak digunakan. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran khusus dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan aset pendidikan (Aulia & Gagaramusu, 2024).

Transformasi digital dalam pengelolaan sarana dan prasarana menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan administratif dan keterbatasan SDM. Implementasi sistem informasi berbasis *cloud computing* memungkinkan integrasi data antara sekolah, dinas pendidikan, dan BPKAD secara *real-time*, mempercepat proses verifikasi dan persetujuan penghapusan aset (Fadillah & Aliyyah, 2024). Platform digital ini juga menyediakan *dashboard monitoring* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Digitalisasi mengurangi beban kerja administratif hingga 60 persen, membebaskan tenaga kependidikan untuk fokus pada fungsi manajerial strategis (Nurharirah & Effane, 2022). Penerapan teknologi seperti barcode untuk pelabelan aset, aplikasi *mobile* untuk laporan kondisi barang, dan sistem notifikasi otomatis untuk jadwal audit terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pengelolaan aset pendidikan.

Implementasi penghapusan sarana dan prasarana yang dilakukan secara sistematis memiliki dampak manajerial yang signifikan bagi pengelola sekolah dan madrasah. Dari sudut pandang tata kelola, penghapusan aset yang teratur dan sesuai prosedur meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Data inventaris yang akurat mempermudah proses pengawasan, evaluasi, dan audit, baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Selain itu, penghapusan sarana dan prasarana yang tidak layak pakai berpengaruh pada efektivitas pengambilan keputusan manajerial. Pengelola sekolah dapat merencanakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dengan lebih rasional karena didukung oleh data aset yang valid dan terkini. Hal ini mencegah terjadinya distorsi dalam perencanaan akibat pencatatan aset yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Arifin, 2023).

Dari perspektif efisiensi organisasi, penghapusan aset berkontribusi pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya sekolah. Pengurangan beban pemeliharaan dan pengamanan barang-barang rusak memungkinkan sekolah untuk mengalokasikan anggaran dan ruang dengan lebih produktif guna mendukung kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, penghapusan sarana dan prasarana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan (Tarman et al., 2024).

Secara keseluruhan, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah elemen penting dalam manajemen aset pendidikan yang fokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Apabila pelaksanaannya tepat akan memperkuat pengelolaan sekolah dan madrasah serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan merupakan komponen integral dalam manajemen pendidikan yang memerlukan pendekatan sistematis dan terstruktur. Penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi inti yang membentuk kerangka penghapusan sarana dan prasarana yang efektif. Strategi pertama adalah perencanaan berbasis inventarisasi dan prioritas kebutuhan yang dilakukan melalui pencatatan rutin dalam buku induk barang untuk mengidentifikasi aset rusak, usang, atau berlebih stok, dengan penetapan prioritas berdasarkan urgensi pembelajaran dan risiko keselamatan yang terintegrasi dengan RAPBS untuk efisiensi dana BOS. Strategi kedua adalah prosedur administratif yang selaras dengan regulasi Permendikbud No. 24/2008 dan platform Dapodik, meliputi penyusunan dokumen berjenjang dari berita acara inventarisasi oleh kepala sekolah dan wakil sarpras hingga persetujuan dinas pendidikan, dengan penerapan empat metode penghapusan secara selektif yaitu pemusnahan, pelelangan melalui LKPP, hibah antarlembaga pendidikan, dan penjualan langsung. Strategi ketiga adalah pengendalian dan pengawasan berkelanjutan melalui audit internal tahunan oleh komite sekolah, evaluasi eksternal oleh dinas pendidikan dan BPKAD, serta pengawasan triwulanan menggunakan *checklist* verifikasi dokumen yang sejalan dengan *Sustainable Development Goal 4*. Ketiga strategi ini membentuk siklus holistik yang terbukti efektif dalam menghemat biaya pemeliharaan barang tidak produktif, meningkatkan keselamatan siswa, dan memfasilitasi pengadaan sarana teknologi modern untuk pembelajaran berkualitas. Bagi manajer pendidikan, implementasi strategi ini perlu dijadikan prioritas manajerial dengan menjadwalkan penghapusan aset sebagai agenda audit semesteran reguler serta mengintegrasikan platform digital untuk meningkatkan efisiensi pelacakan inventaris dan mempercepat koordinasi lintas lembaga.

Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap efektivitas implementasi strategi penghapusan sarana dan prasarana antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbandingan ini membantu memahami pengaruh faktor kelembagaan, geografis, dan sosio-ekonomi terhadap keberhasilan

tiga strategi utama. Studi kasus kualitatif di berbagai lokasi akan mengungkap praktik terbaik, tantangan, serta solusi kontekstual untuk manajer pendidikan. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan desain eksperimental diperlukan untuk mengukur dampak nyata strategi ini terhadap efisiensi anggaran BOS dan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini membandingkan sekolah yang menerapkan sistem penghapusan terstruktur dengan kelompok kontrol menggunakan metode biasa, dengan indikator seperti penghematan biaya, waktu proses, kepatuhan regulasi, serta peningkatan sarana modern dan hasil belajar siswa. Hasilnya akan memberikan bukti kuat untuk kebijakan nasional yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R., Irmawan, B., Juanda, S., & Aswadi, M. K. (2023). Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 9672–9678. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3297>
- Arifin, Z. (2023). Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah. *At-Tahsin: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.59106/attahsin.v3i2.138>
- Aryesam, A., Sampe, N., Toam, A., Maseyra, M., & Tanggronefa, D. (2025). Pendampingan Inventarisasi Dan Penghapusan Sarpras Untuk Tertib Administrasi Smp Ypk Hedam Dan Sd Ypk Sion Padang Bulan Jayapura. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6716>
- Aulia, C. S., & Gagaramusu, Y. (2024). Analisis Implementasi RKAS di SD Negeri 1 Tolisu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 744–763. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3551>
- Cernasev, A., & Axon, D. R. (2023). Research and scholarly methods: Thematic analysis. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy*, 6(7), 751–755. <https://doi.org/10.1002/jac5.1817>
- Dewanto, S. A., Wulandari, B., Munir, A. Q., & Setiyawan, R. (2025). Optimasi Sistem Informasi Berbasis Web Dalam Inventarisasi di Sekolah SMP Negeri 12 Yogyakarta. 4(4), 980–990. <https://doi.org/10.59025/rz5aff50>
- Fadillah, R., & Aliyyah, R. R. (2024). Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. 3, 3164–3176. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12248>
- Hidayat, R., Maulana, R. K., Arrabani, R. J., Saputra, R. E. Y., & Anggraeni, R. J. S. (2025). Analisis Praktik Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SMPN 02 Jenggawah. 56–65. <https://doi.org/10.61104/qb.v2i1.243>
- Hutasoit, D. F., Sihombing, R., & Panggabean, E. C. (2024). Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Sma Negeri 1 Siborongborong Tahun 2024. 3(4), 4065–4076. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1345>
- Ibrahim, I., Pitria, M., & Setyaningsih, K. (2024). Penghapusan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sma Iba Palembang. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1). <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.155>

- Jannah, R. R., & Santosa, S. (2025). Manajemen Sarana dan Prasarana di Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 660–670. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.950>
- Kurniawan, D. C., Widiyanah, I., Hazin, M., Khamidi, A., Trihantoyo, S., & Suryanti, S. (2025). Peran Sarana Dan Prasarana Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran: Systematic Literature Review (2020-2025). *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 1053–1066. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.8051>
- Nafatila, Y., Hasbi, M., & Rohman, A. (2025). Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang. *II(1)*, 112–118. <https://doi.org/10.19109/elidare.v1i1i.27566>
- Nasiruddin, Fauzi, A., & Hidayat, W. (2024). Manajemen Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan. *06(03)*, 17404–17411. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5669>
- Nauraida, I. D., & Triwiyanto, T. (2024). Hambatan dalam Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah: Sebuah Meta-analisis. *2(4)*, 35–45. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i4.448>
- Ningsih, M., Sardimi, S., & Muzakki, M. (2021). Manajemen Penghapusan Sarana Pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya pada Masa Covid-19. 1–14. <https://doi.org/10.23971/muallimun.v1i1.3200>
- Nurharirah, S., & Effane, A. (2022). Hambatan dan Solusi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i2.7709>
- Regmi, B. P. (2024). Qualitative Research Design: A Discussion on its Types. *Research Journal*, 9(1), 37–45. <https://doi.org/10.3126/rj.v9i1.74415>
- Sajdah, S. P., Juwita, P., Arkananta, A. M., & Kusumaningrum, H. (2025). Manajemen Sarana Prasarana Berbasis Teknologi untuk Pembelajaran. *3*. <https://doi.org/10.61104/jmpai.v3i1.827>
- Setiyadi, B., Ramadhan, B., Ulfa, M., Rosdiati, R., & Hersalinda, T. (2024). Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan. *14(April)*, 162–169. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v14i1.618>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sudrajat, S., & Rahmawati, T. (2025). Management of Learning Facilities in Public Middle Schools. *JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN*, 58(1), 76–89. <https://doi.org/10.23887/jpp.v58i1.83965>
- Suranto, D. I., Annur, S., Ibrahim, I., & Alfiyanto, A. (2022). Pentingnya Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 1(2), 59–66. <https://doi.org/10.33578/kpd.v1i2.26>
- Tarman, T., Setiyati, S., Metta, M., & Warman, W. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar Islam. *El-Buhuth*, 6(2), 509–526. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i2.8816>

Zainudin, A., & Badrudin. (2023). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah Unggulan SD Bintang Madani. 9(1), 36–44.
<https://doi.org/10.19109/elidare.v9i1.15248>